

JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM **MAHKAMAH**

Volume 1

Edisi Januari - Juni 2013

ISSN : 2355 - 0546

PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL, TEORI HUKUM KETATANEGARAAN DAN TEORI LIVING LAW

H. Kustim

PERKAWINAN JAHILIYAH DAN PENGARUTINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM

H. Munir Subqamul

FENOMENA TERORISME DI INDONESIA
ANTARA GERAKAN TEOLOGI-POLITIK DAN RELIGIOUS EXTREMIST

Ibi Saibbi

PROTEKSI HUKUM BAGI TENAGA KERJA TIDAK TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Leliya

HAKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM

Dudi Sukardi

HUKUM PENYEMBELIHAN AHLUL-KITAB
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID QUTB)

Nurul Fawah

KONSEP PEMINANGAN DALAM ISLAM: ANALISIS KRITIS HADIS PEMINANGAN

Nurul Ma'rifah

INSTRUMEN UANG PAKSA DAN ISENSI GUGATAN PUTUSAN PEJABAT DATA USAHA NEGARA

Ricko Wahyudi

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON





FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

ISSN 2355-0546



JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM

AL MAHKAMAH VOL 1 No. 1 Edisi Januari - Juni 2013

1. H. Kosim
2. H. Munir Subarman
3. Ibi Satibi
4. Leliya
5. Didi Sukardi
6. Naila Farah
7. Nurul Ma'rifah
8. Ricko Wahyudi

Diterbitkan oleh :

Syariah Nurjati Press

Fakultas Syariah

IAIN SYEKH NURIATI CIREBON

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Tlp (0231481264)

Penanggung jawab : Achmad Kholiq

Penyunting : Nurul Ma'rifah

Desain cover & layout : Maman Abdurachman

Percetakan : CV. ELSI Pro

Cetakan Pertama : Desember 2013

142 Halaman

ISSN : 2355-0546

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Vol 1 Periode Januari-Juni 2013

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Penanggung Jawab

Achmad Kholiq

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur

H. Ilham Bustomi

Penyunting

Nurul Ma'rifah

Desain Grafis

Maman Abdurachman

Sekretaris

Sugianto

Nursyamsudin

Deding Sudarso

Faidatun Nasikhah

Alfin Nurulfaz

Alamat

Jl. Perjuangan By Pass Cirebon

Telp./Fax. 0231 481 264/0231 489 926

E-Mail: syariahnurjati.cirebon@yahoo.com

Terbit dua kali setahun

JUNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Volume I

Edisi Januari-Juni

PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL, TEORI HUKUM KETATANEGARAAN DAN TEORI LIVING LAW

H. Kosim

PERKAWINAN JAHILIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM

H. Munir Subarman

FENOMENA TERORISME DI INDONESIA

ANTARA GERAKAN TEOLOGI-POLITIK DAN *RELIGIOUS EXTREMIST*

Ibi Satibi

PROTEKSI HUKUM BAGI TENAGA KERJA TIDAK TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Leliya

HAKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM

Didi Sukardi

HUKUM PENYEMBELIHAN *AHL AL-KITAB*

(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID QUTB)

Naila Farah

KONSEP PEMINANGAN DALAM ISLAM: ANALISIS KRITIS HADIS PEMINANGAN

Nurul Ma'rifah

INSTRUMEN UANG PAKSA DAN ESENSI GUGATAN PUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Ricko Wahyudi

Periode

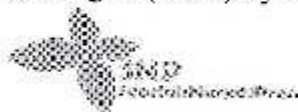
Januari-Juni 2013

Vol. I

Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah (AAS)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Dengan ucapan Alhamdulillah, redaktur jurnal "MAHKAMAH" senantiasa memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga terbit Jurnal Mahkamah periode Januari-Juni 2013. Demikian, Sholawat dan Salam senantiasa terlimpahkan ke Pangkuan Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan spirit peradaban kepada umatnya.

Jurnal "MAHKAMAH" merupakan jurnal kajian hukum Islam, yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, juga diharapkan menjadi penanda semakin dinamisnya hukum Islam yang mengandung rahmat bagi seluruh alam.

Edisi Vol 1 periode Januari-Juni 2013 jurnal "MAHKAMAH" ini mengetengahkan beberapa tulisan yang diawali dengan tulisan berjudul: Peradilan agama pada masa reformasi dalam perspektif teori sosial, teori hukum ketatanegaraan dan teori living law oleh H. Kosim, tulisan yang kedua membahas perkawinan jahiliyah dan pengaruhnya terhadap hukum perkawinan Islam oleh H. Munir subarman. Kemudian tulisan yang ketiga adalah fenomena terorisme di Indonesia Antara gerakan teologi-politik dan *religious extremist* oleh Ibi satibi. Kemudian tulisan selanjutnya berjudul proteksi hukum bagi tenaga kerja tidak tetap berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh Leliya. Tulisan dengan tema hakim dalam perspektif sistem peradilan Islam ditulis oleh Didi sukardi, kemudian hukum penyembelihan *ahl al-kitah* studi terhadap pemikiran sayyid quth ditulis oleh Naila farah. Tulisan terakhir tentang konsep peminangan dalam Islam dengan analisis kritis hadis peminangan oleh Nurul ma'rifah.

Demikianlah, beberapa tulisan yang hadir pada edisi ini. Guna mengetahui dan mengkaji lebih jauh, dipersilakan para pembaca untuk menyimak satu per satu tulisan yang ada dalam edisi ini. Akhirnya, redaktur Jurnal "MAHKAMAH" mengucapkan terima kasih atas bantuan banyak pihak sehingga edisi ini bisa hadir di hadapan pembaca. Redaktur juga mohon maaf atas segala kekurangan edisi ini. Sehingga, saran konstruktif senantiasa terbuka guna perbaikan pada edisi-edisi mendatang. Selamat Membaca !

Cirebon, Juni 2013

Redaktur

H. Ilham Bustami

DAFTAR ISI

PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL, TEORI HUKUM KETATANEGARAAN DAN TEORI LIVING LAW <i>H. Kosim</i>	1
PERKAWINAN JAHILIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM <i>H. Munir Subarman</i>	23
FENOMENA TERORISME DI INDONESIA ANTARA GERAKAN TEOLOGI-POLITIK DAN <i>RELIGIOUS EXTREMIST</i> <i>Ibi Satibi</i>	43
PROTEKSI HUKUM BAGI TENAGA KERJA TIDAK TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN <i>Leliya</i>	59
HAKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM <i>Didi Sukardi</i>	67
HUKUM PENYEMBELIHAN <i>AHL AL-KITAB</i> (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID QUTB) <i>Naila Farah</i>	91
KONSEP PEMINANGAN DALAM ISLAM: ANALISIS KRITIS HADIS PEMINANGAN <i>Nurul Ma'rifah</i>	109
INSTRUMEN UANG PAKSA DAN ESENSI GUGATAN PUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA <i>Ricko Wahyudi</i>	125

Peradilan Agama Pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law

Oleh: H.Kosim

Abstrak

Peradilan Agama pada Masa reformasi mengalami banyak perkembangan, terbukti dengan beralihnya Pembinaan peradilan agama dalam sistem satu atap ke Mahkamah Agung, sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan di era reformasi, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama. Dalam Perspektif teori sosial dan ketatanegaraan, Peradilan Agama Indonesia mengalami fluktuasi dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan mereka memperjuangkannya melalui sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga wewenang Peradilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan serta dengan adanya peradilan agama merupakan fungsional interaksional simbolis antara penduduk Indonesia yang mayoritas beragama dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, walaupun secara teori konflik dan pertukaran sosial masih menyisakan persoalan. Adapun jika ditinjau dari perspektif Living Law, Peradilan pada masa reformasi terlihat sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua substansi hukum yang ada di peradilan sesuai dengan Indonesia livinglaw.

abstract

Religious Courts in Time of reforms have been many developments, as evidenced by the shift of of religion courts in fostering system to the roof of the Supreme Court, in an effort to realize the independence of judicial power and create an impartial court (as impartial). With the birth of the legislation in the reform era, then practically there are various legal consequences that intersect directly with the position of religious courts. With the birth of the legislation in the reform era. In the perspective of social and constitutional theory, Indonesian Religious Courts fluctuated because of the predominantly Muslim Indonesia and they fight through a constitutional legal system of Indonesia, Religious Courts so that the authority has increased significantly as well as the

presence of a functional interactional justice is a religious symbolic among the Indonesian population predominantly with Indonesian state system, although conflicts and social exchange theory still leaves the problem. As if it is viewed from the perspective of Living Law, Justice looks at the reform period is strongly influenced by the state of Muslim-majority Indonesia, although in reality, not all legal substance that is in accordance with the Indonesian justice livinglaw.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Teori Sosial, Teori Ketatanegaraan, Teori Living Law

A. Pendahuluan

Seiring Perkembangan Zaman dan semakin kompleksnya dinamika kehidupan bangsa Indonesia, maka perkara-perkara hukum di masyarakat sangat potensial bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Salah satu yang menjadi aksentuasi adalah perkembangan lembaga ekonomi syari'ah yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai deskripsi awal, perkembangan syari'ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perangkat syari'ah masih belasan, maka tahun 2000, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syari'ah melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset perbankan syari'ah ketika itu belum mencapai Rp. 1 Triliun maka saat ini asetnya lebih dari 22 triliun. Lembaga asuransi syari'ah pada tahun 1994 hanya dua buah, yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syari'ah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi syari'ah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syari'ah. Dari sini, peradilan agama, secara institusional dituntut untuk terlibat dalam penanganan kasus-kasus pidana ekonomi syari'ah. Namun kendala yang cukup riskan menghambat upaya tersebut, mengingat otoritas peradilan agama yang hanya menangani perkara-perkara di bidang perdata, seperti wakaf, cerai, hibah, zakat, infak, shadaqah, waris dan perkawinan. Dapat dipahami mengingat masalah-masalah yang muncul di masyarakat banyak berkualifikasi pidana, sehingga peradilan agama tidak sanggup untuk menyentuhnya.¹

Hal di atas yang agaknya menjadi pertimbangan pertama bagi pemerintah untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam upaya melibatkan pengadilan agama pada penyelesaian perkara-perkara pidana ekonom syari'ah.

¹ Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag, *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Perspektif Teori Sosial dan Teori Hukum Ketatanegaraan* (Cirebon: Nurjati Press, 2011), hlm. 155

Dasar yang menjadi pertimbangan lainnya adalah realitas yang memperlihatkan betapa pengadilan umum kewalahan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan hingga banyak perkara yang terkatung-katung tanpa ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Hal tersebut lebih diperparah dengan banyaknya keputusan pengadilan umum yang tergolong manipulatif karena pertimbangan hukum yang diberikan sering tidak menyentuh substansi hukum yang sesungguhnya, ditambah lagi dengan maraknya mafia pengadilan yang semakin menenggelamkan reputasi pengadilan umum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, sangatlah pantas untuk mengeluarkan suatu aturan baru sebagai upaya progresif dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih representatif, tentunya dengan pemberian wewenang pada pengadilan agama yang lebih komprehensif dalam perkara pidana.²

Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 merupakan aktualisasi dari hal di atas. Dengan undang-undang ini, maka pengadilan agama diberi kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, reksadana syari'ah, asuransi syari'ah, dan obligasi syari'ah. Dengan peraturan ini, pengadilan agama dituntut untuk menjalankan peran pengadilan sebagai pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum. Pengadilan agama mengemban ekspektasi besar masyarakat untuk mengiring perubahan menuju tatanan hukum yang representatif dan transparan, serta memenuhi dahaga keadilan di masyarakat yang selama ini ditutupi oleh tabir mafia pengadilan yang menggerogoti dinamika hukum di Indonesia.

Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, pengadilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karena itu, eksistensi pengadilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada pengadilan agama.³

Sehingga Pada Desember 2006, pemerintah menetapkan amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang signifikan bagi pengadilan agama, baik dalam konteks institusional maupun dalam konteks kewenangan mengadili (yurisdiksi).⁴

²Ibid, ... hlm. 156

³Ibid

⁴Ibid

B. Peradilan Agama Pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law

1. Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Satu Atap

Pergeseran kekuasaan dari rezim Orde Baru ke Pemerintahan Orde Reformasi membawa serta merta berbagai perubahan dalam ranah sosial, politik dan hukum. Perubahan mendasar dalam bidang hukum, yakni dilakukannya amandemen atas UUD 1945 itu berbunyi : "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya UU No.35 Tahun 1999 tentang Sistem Peradilan Satu Atap, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan-Kehakiman (Amandemen atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman), dan UU No.48 Tahun 2009 (Amandemen atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁵

Lahirnya berbagai peraturan itu menunjukkan adanya tekad yang kuat dan bulat dalam usaha penguatan terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dalam ranah hukum, sekaligus sebagai wujud nyata pengawalan terhadap perubahan mendasar dalam sistem peradilan, yakni dari "sistem peradilan mendua", yang berpijak di atas dua kaki berubah ke sistem Peradilan Satu Atap.⁶

Melalui UU No. 4 Tahun 2004, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditetapkan pengalihan kewenangan yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan, kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁷

⁵Oyo Sunaryo Mulklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 151

⁶ Sebelum diamandemen, berlaku pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara organisatoris, empat pengadilan tersebut di bawah departemen masing-masing.

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlis, ... hlm. 152

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) No. 48 Tahun 2009, maka kewenangan dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan agama berpindah dari lembaga eksekutif, yakni Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama kepada lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dalam bidang organisasi itu sendiri meliputi: kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi. Sementara yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi meliputi: kepegawaian, kekayaan, negara, keuangan, arsip, dan dokumen. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalihan dalam bidang finansial adalah mengenai anggaran yang sedang berjalan. Seluruh unsur yang berada pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah itu beralih dan masuk ke dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁸

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung itu merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*).⁹ Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama. *Pertama*, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama yang sejak proklamasi kemerdekaan RI berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁰

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung itu sendiri banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat Islam, terutama para elit politik dan tokoh agama Islam. Meskipun demikian, pada akhirnya semua pihak

⁸ Ibid

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia" dalam *Pedoman Pelaksanaan diskusi Panel Pengembangan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 24-27 April 2007).

¹⁰ Ibid.

dapat memahami dan secara legowo dapat menerima mengenai kebijakan pengalihan itu. Namun hanya karena alasan teknis, proses pengalihan badan peradilan agama, yang semestinya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004¹¹ oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah Agung mengalami sedikit penundaan.

Berkenaan dengan kebijakan sistem peradilanannya satu atap itu, maka dilakukan pula langkah-langkah adaptasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan badan peradilan agama. Untuk itu, dilakukan dua kali amandemen terhadap UU No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 2006, yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 2006¹² dan melalui UU No. 50 Tahun 2009, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.¹³

Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Itu telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yudisial maupun nonyudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.¹⁴

Dasar Pemikiran dilakukannya Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut.¹⁵

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku

¹¹ Kepres No. 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan organisasi, administratif, dan finansial Lembaga Peradilan ke Mahkamah Agung.

¹² Anonimous, *Amandemen Peradilan Agama Atas UU No.07 Tahun 1980*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. v.

¹³ Oyo Sunaryo, ... hlm. 153

¹⁴ Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Amandemen Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

¹⁵ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.
 - c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*
 - d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim
 - e. Keamanan dan kesejahteraan hakim
 - f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan
 - g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara
 - h. Bantuan hukum
 - i. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman hakim.

Secara umum, Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁶

Pendekatan yang dilakukan dalam amandemen itu bersifat "adendum", dengan arti kata bahwa rumusan peraturan lama yang terdapat dalam pasal-pasal itu secara tekstual masih tetap tertulis mendampingi pasal-pasal baru hasil amandemen. Dalam hal ini, pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlaku sejauh tidak ditetapkan lain dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini mengatur administrasi baru tentang susunan peradilan agama (hakim-hakim agama) dan memperluas kompetensi absolut pengadilan dalam peradilan agama.¹⁷

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 mengalami perubahan, baik melalui amandemen pertama, yakni UU No. 3 Tahun 2006 maupun melalui UU No. 50 Tahun 2009. Diantara

¹⁶ Oyo Sunaryo, ... hlm. 154

¹⁷ Ibid.

perubahan itu, berkenaan dengan adanya pengkhususan pengadilan. Dalam pasal 3A UU No. 3 tahun 2006, sebagai sisipan antara pasal 3 dengan pasal 4, disebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Pada amandemen ke dua atas UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009, pasal 3A itu mengalami perubahan dan penekanan makna, sehingga menjadi:

- a. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Peradilan Pasal 3A itu sekaligus merupakan penjabaran dan penguatan atas ketentuan pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004, yang menempatkan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengadilan khusus yang memiliki dua kewenangan absolut, yakni kewenangan Peradilan Agama dan kewenangan Peradilan Umum.

2. Asas-Asas Peradilan Agama

Dengan mencermati kandungan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasca amandemen, baik melalui UU No. 3 Tahun 2006 maupun melalui UU No. 50 Tahun 2009 (amandemen ke dua) dapat ditemukan beberapa asas yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu seperti yang di jelaskan sebagai berikut.

a. Personalitas Ke-Islaman

Para pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah orang-orang tertentu, yaitu orang yang beragama Islam. Dengan kata lain orang-orang yang bukan beragama Islam tidak dapat berperkara di lingkungan Peradilan agama. Hal itu secara jelas dirumuskan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 (Amandemen ke dua da UU No. 7 Tahun) 1989 yang berbunyi : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Keputusan pasal tersebut semakin mempertegas bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum

dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

b. Pengadilan Pertama dan Ke dua

Penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi : Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Ketentuan pasal 3 ini dipertegas lagi dengan pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989 *jo*. UU No. 3 Tahun 2006 *jo*. UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan terdiri air pengadilan agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

c. Wilayah Hukum Peradilan Agama

Wilayah hukum kekuasaan peradilan agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara disesuaikan dengan kedudukan daerah hukumnya masing-masing. Daerah hukum pengadilan agama sebagai pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara tingkat pertama adalah daerah hukum ibukota kabupaten atau pemerintah kota. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.¹⁸ Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi sebagai pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara tingkat banding adalah daerah hukum ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hal tersebut secara jelas terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

d. Kewenangan Mengadili Perkara Tertentu

Kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : peradilan agama

¹⁸ Lihat Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006), Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - 3) Dispensasi kawin;
 - 4) Pencegahan perkawinan;
 - 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
 - 6) Pembatalan perkawinan;
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - 8) Perceraian karena talak;
 - 9) Gugatan perceraian;
 - 10) Penyelesaian harta bersama;
 - 11) Penguasaan anak-anak;
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
 - 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali;
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali seorang wali dicabut;
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - 19) Penentuan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Bidang Waris

Dalam penjelasan atas Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" itu meliputi:

- 1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;

- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan;
- 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

c. Bidang Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Bidang Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Bidang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syari'at.

f. Bidang Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Bidang Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wata'ala.

h. Bidang Ekonomi Syari'ah

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang mencakup :

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Asuransi Syari'ah;
- 3) Reasuransi Syari'ah;
- 4) Reksadana Syari'ah;
- 5) Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 6) Sekuritas Syari'ah
- 7) Pembiayaan Syari'ah

- 8) Pegadaian Syari'ah
- 9) Dana Pensiun Syari'ah Lembaga Keuangan Syari'ah
- 10) Bisnis Syari'ah; dan
- 11) Lembaga keuangan mikro syari'ah

i. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Kewenangan peradilan agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009. Dalam memeriksa perkara tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 50, terdapat kewenangan yang menuntut adanya penundaan pemeriksaan dan yang menuntut adanya pemeriksaan dan penyelesaian dua perkara atau lebih secara sekaligus.

j. Penundaan Memeriksa dan Mengadili

Apabila dalam memeriksa perkara, ternyata ditemukan bahwa objek perkaranya itu dalam sengketa hak milik atau sengketa lain, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Secara eksplisit hal itu dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 *Jo* UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, apabila suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama masih terdapat sengketa hak milik, maka pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa tersebut harus diputus oleh pangdilan negeri. Contoh : Fakhri dan Mano, dua orang kakak beradik bersengketa mengenai harta waris. Fakhri menggugat Mano ke pengadilan agama yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa Mano telah menguasai semua harta peninggalan, termasuk sebuah rumah yang ditempati Mano dengan tanpa hak. Apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat pihak lain (Satria) yang keberatan, dan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama, bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa di pengadilan agama, maka dalam posisi kasus seperti itu pengadilan agama harus menunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan dalam lingkung peradilan umum. Mengingat penyelesaian hak sengketa hak milik itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun

2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan penuh pengadilan negeri.

k. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Di dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009. Perkara yang dimaksud itu meliputi : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, adalah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan atas UU on. 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) itu memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 apabila subjek sengketa itu terjadi Siantar orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari adanya upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa, karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Contoh : Fakhri dan Mano, dua orang kakak beradik yang beragama Islam, bersengketa mengenai harta waris. Fakhri menggugat Mano ke pengadilan agama, yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa Mano telah menguasai seluruh harta peninggalan, termasuk rumah yang ditempati Mano tanpa hak. Dalam persidangan Mano menyanggah gugatan Fakhri dengan menyatakan bahwa rumah yang dikuasai Mano adalah hasil pembelian dari Marshel.

Dalam posisi kasus seperti ini, maka pengadilan agama diberi wewenang penuh untuk mengadili perkara waris sekaligus menyelesaikan sengketa hak miliknya, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan negeri, mengingat pihak-pihak yang menjadi subjek sengketa itu sama-sama beragama Islam.

l. Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak

Keharusan mengadili menurut hukum dan persamaan hak dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. *Pertama,*

rumusan “mengadili menurut hukum”, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut memberi pemahaman bahwa lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpedoman dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang sah dan dibuat oleh lembaga yang kompeten. Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dalam pengertian menurut hukum adalah seluruh nilai yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, kultur, kebiasaan, dan kepatutan.

Kedua, rumusan mengadili “dengan tidak membedakan orang” mengundang pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Menurut M. Yahya Harahap, persamaan hak tersebut berpedoman pada beberapa geram berikut.

- m. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau *equal before The law*
- n. Hak perlindungan yang sama Loe hukum atau *equal Protection on The las*
- o. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau *equal justice under The las*.²⁰
- p. Aktif Memberi Bantuan

Keharusan memberikan bantuan yang dilakukan oleh pengadilan dan perangkat terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kandungan hukum yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut mengharuskan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim agar aktif memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberian bantuan tersebut terbatas pada bantuan atau memberi nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah “formal” atau mengenai tata cara beracara di pengadilan. Hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasihat kepada para pihak sepanjang mengenai masalah materiil atau pokok perkara. Hal itu semata-mata agar pemeriksaan perkara di persidangan berjalan lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara.

²⁰ Ibid, klm. 73

sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Karena itu sangat disayangkan apabila terdapat kesalahan dalam masalah formal, perkara yang diperiksa menjadi tertunda.

3. Mahkamah Syar'iyah dalam UU No. 18 Tahun 2001

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Dalam konsiderans huruf (c) disebutkan, *bahwa pelaksana Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Dalam UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 25 disebutkan:

- a. *Peradilan Syari'at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun;*
- b. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam System hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi NAD;*
- c. *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.*²¹

Pada pasal tersebut jelas ada tambahan pada "Keistimewaan" Aceh. Yakni adanya *Lembaga Peradilan Khusus* untuk melaksanakan syari'at Islam yaitu *Mahkamah Syar'iyah* sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga (Mahkamah) inilah yang berwenang melaksanakan syari'at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.²² Demikian juga tentang sengketa kewenangan mengadili antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga peradilan lainnya.²³

Mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah, UU No. 18 Tahun 2001 menyerahkan pada qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²¹BasiqDjalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 191

²²UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi : "Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI".

²³Ibid., Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2001 berbunyi: "Sengketa-sengketa antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk tingkat pertama dan tingkat akhir".

Dan saat ini telah disahkan qanun provinsi NAD No. 10 tahun 2002 tentang *Peradilan Syari'at Islam*. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi hukum kekeluargaan, hukum perikatan, dan hukum harta benda serta perkara-perkara di bidang *Pidana yang meliputi Qishas-Diyat, Hudud, dan Ta'zir* sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah.²⁴

Hukum Materiil dan Hukum Formil Mahkamah Syar'iyah harus menggunakan Syari'at Islam. Menurut Qanun No. 10 Tahun 2002 Pasal 53 dan 54, hukum materiil dan formil yang bersumber dari syari'at Islam akan dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk qanun provinsi NAD. Kalau begitu syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi harus dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu.²⁵

Mengenai Kepolisian Daerah NAD diatur dalam Pasal 21-23 UU No. 18 Tahun 2001. Sedang tentang kejaksan diatur dalam pasal 24. Pasal 21 ayat (1) menyatakan : *tugas kepolisian dilaksanakan oleh kepolisian daerah Provinsi NAD sebagai bagian dari Kepolisian Negara RI*. Sedang pada ayat 4 : *hal-hal mengenai tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi NAD*. Sedang Pasal 22 ayat (4) : *Penempatan perwira, hintura dan tamtama kepolisian Negara RI dari luar Aceh ke kepolisian daerah provinsi NAD dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan*.²⁶

Mengenai Kejaksan, Pasal 24 menyatakan:

- a. Tugas Kejaksan dilaksanakan oleh Kejaksan Provinsi NAD sebagai bagian dari Kejaksan RI;
 - b. Pengangkatan Kepala Kejaksan Tinggi Provinsi NAD dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur Provinsi NAD;
 - c. Pemberhentian Kepala Kejaksan Tinggi di Provinsi NAD dilakukan oleh Jaksa Agung.²⁷
4. **Peradilan Agama pada Reformasi sampai sekarang dalam Perspektif Teori Sosial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law**

Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan

²⁴Basiquljalil, ... hlm. 193

²⁵Ibid

²⁶Ibid

²⁷Ibid

politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karena itu, eksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan agama.²⁸

Pada Desember 2006, pemerintah menctapkan amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang signifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks institusional maupun dalam konteks kewenangan mengadili (yurisdiksi).²⁹

Dalam konteks institusional, peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum, lainnya dalam tata hukum di Indonesia. Lebih lanjut, substansi dari UU No. 3 Tahun 2006 salah satunya menerapkan kebijakan satu atap institusi kehakiman. Peradilan agama yang sebelumnya masih dalam naungan Departemen Agama, setelah amandemen, maka peradilan agama berada di bawah otoritas atau naungan mahkamah agung. Hal ini membawa keuntungan yang sangat signifikan bagi peradilan agama itu sendiri. *Pertama*, peradilan agama mendapatkan pengakuan yang luas dari lembaga-lembaga atau institusi hukum lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum kebijakan satu atap ini, peradilan agama dipandang sebelah mata sehingga menurunkan reputasinya sebagai lembaga pengadil. Dapat dipahami, selain pada saat itu belum dibawah langsung oleh Mahkamah Agung, partisipasi peradilan agama dalam hal lalu lintas hukum kurang komprehensif. *Kedua*, peradilan agama setelah keluarnya kebijakan satu atap ini mulai mendapatkan prioritas yang seimbang dengan peradilan umum lainnya, seperti peradilan negeri. Peningkatan prioritas itu antara lain ditandai dengan bertambahnya hakim agung yang direkrut dari hakim-hakim tinggi yang berlatar belakang hakim peradilan agama. Adalah suatu yang cukup menggembirakan ketika hakim-hakim agama (hakim tinggi) diberi akses yang luas sebagaimana yang berlaku bagi hakim-hakim negeri (hakim tinggi) untuk menjadi hakim agung, sebab dengan hal ini partisipasi peradilan agama secara tidak langsung dalam upaya penegakan supremasi hukum menjadi lebih signifikan dan sebagai salah

²⁸Kosim Rusdi, ... hlm. 156

²⁹Ibid

satu wahana bagi aktualisasi visi luhur bagi peradilan agama (pengayoman).³⁰

Dalam konteks kewenangan mengadili, yurisdiksi peradilan agama mengalami perluasan yang cukup signifikan. Peradilan agama tidak lagi hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, namun lebih dari itu peradilan agama diberikan wewenang yang lebih krusial. Pada pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi :

- a. Bank Syari'ah
- b. Lembaga Keuangan mikro Syari'ah
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reasuransi Syari'ah
- e. Reksadana Syari'ah
- f. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Pembiayaan Syari'ah
- i. Pegadaian Syari'ah
- j. Dana Pensiun Syari'ah Lembaga Keuangan Syari'ah
- k. Bisnis Syari'ah³¹

Dengan perluasan kewenangan di atas, maka partisipasi peradilan agama dalam menjaga stabilitas hukum masyarakat lebih luas. Peranan peradilan agama sangat diharapkan, terutama untuk menyelesaikan perkara ekonomis syari'ah yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Eksistensi peradilan agama akan benar-benar teruji jika ke depan, peradilan agama dapat menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah dengan putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.³²

Dengan demikian, Dr. Kosim dalam Bukunya Sejarah Peradilan Agama Sejarah Peradilan Agama Perspektif Teori Sosial dan Teori Hukum Ketatanegaraan mengatakan bahwa Peradilan Agama di Indonesia dalam perspektif teori sosial dan teori hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami fluktuasi dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan mereka memperjuangkannya melalui sistem hukum ketatanegaraan Indonesia,

³⁰Ibid,... hlm. 157

³¹Ibid,... hlm. 158

³²Ibid

sehingga wewenang Peradilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan serta dengan adanya peradilan agama merupakan fungsional interaksional simbolis antara penduduk Indonesia yang mayoritas beragama dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, walaupun secara teori konflik dan pertukaran sosial masih menyisakan persoalan.³³

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Living Law, di mana dalam teori ini, Hukum tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara). Sumber nyata (real) dari hukum itu bukan dari Undang-undang (UU) atau yang diperoleh dari kasus-kasus, tetapi sumber hukum itu adalah dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu dan tugas Hakim mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat. Pusat dari gravitasi hukum itu terletak dalam tubuh (kehidupan) masyarakat itu sendiri dan diminimalkan dari legislatif.

Sehingga, jika perkembangan Peradilan Agama dilihat dari perspektif ini sangatlah sesuai dan terlihat sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua substansi hukum yang ada di peradilan agama sesuai dengan teori living law.

C. Kesimpulan

Peradilan Agama pada Masa reformasi mengalami banyak perkembangan, terbukti dengan beralihnya Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung itu sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan di era reformasi, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama.

Pertama, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama yang sejak proklamasi kemerdekaan RI berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung itu sendiri banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat Islam, terutama para elit politik dan tokoh agama Islam.

³³Ibid

Selain itu, Peradilan Agama di Aceh juga seperti mendapat angin segar dengan diberikannya kekuasaan absolut dalam Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001, sehingga terbentuklah Mahkamah Syari'ah yang membawahi seluruh rakyat Aceh yang beragama Islam dalam Nahkoda Syari'at Islam.

Dalam Perspektif teori sosial dan ketatanegaraan, Peradilan Agama Indonesia mengalami fluktuasi dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan mereka memperjuangkannya melalui sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga wewenang Peradilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan serta dengan adanya peradilan agama merupakan fungsional intraksional simbolis antara penduduk Indonesia yang mayoritas beragama dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, walaupun secara teori konflik dan pertukaran sosial masih menyisakan persoalan.

Adapun jika ditinjau dari perspektif Living Law, Peradilan pada masa reformasi terlihat sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua substansi hukum yang ada di peradilan sesuai dengan Indonesia livinglaw.

DAFTAR PUSTAKA

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006), Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Anonimous, Amandemen Peradilan Agama Atas UU No.07 Tahun 1980, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia" dalam Pedoman Pelaksanaan diskusi Panel Pengembangan Hukum Nasional, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 24-27 April 2007).

BasirDjalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 191

Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag, Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Perspektif Teori Sosial dan Teori Hukum Ketatanegaraan (Cirebon: Nurjati Press, 2011)

KepresNo. 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan organisasi, administratif, dan finansial Lembaga Peradilan ke Mahkamah Agung.

Oyo Sunaryo Mukhlis, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)

UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peradilan Agama pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama